

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2019, luas mangrove Indonesia \pm 3,34 juta Ha, dimana seluas \pm 2,67 juta Ha (81%) ekosistem mangrove dalam kondisi baik. Sementara itu, seluas \pm 0,67 juta Ha (19%) dalam kondisi kritis dan perlu segera direhabilitasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Menurut Cifor (2012), luas hutan mangrove di Indonesia 30-50% mengalami penurunan dalam setengah abad terakhir ini sebab pembangunan daerah pesisir, abrasi air laut, dan penebangan yang berlebihan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas perairan laut mencapai 186.500 km² dengan panjang garis pantai lebih kurang 2.420,385 km, serta mempunyai 185 buah pulau-pulau kecil, sehingga memiliki kekayaan sumber daya alam (Saputri dan Muchtar, 2019). Sumatera barat terdata areal penyebaran hutan mangrove seluas 39.670 ha, tersebar pada kabupaten dan kota yang memiliki pantai seperti pasaman barat 6.046,50 ha, kabupaten pariaman 200,00 ha, kota pariaman 65,00 ha, kabupaten agam 313,50 ha, kota padang 120,00 ha, kabupaten pesisir selatan 325,00 ha, dan 32.600 ha dipesisir gugusan pulau kabupaten kepulauan Mentawai (Kamal, 2005).

Wilayah pesisir melambangkan daerah peralihan antara daratan dan lautan yang masih terkena pengaruh dari daratan ataupun lautan. Dilihat dari garis pantai (*coastline*), suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai (*longsor*) dan batas yang tegak lurus dengan garis pantai (*crossshore*) (Prihadi, 2015). Potensi wilayah pesisir merupakan daerah yang menjanjikan dengan berbagai banyaknya sumber daya yang dapat dikelola serta dimanfaatkan dengan banyak cara, salah satunya dengan pariwisata khususnya wiasata bahari.

Kekayaan sumber daya wilayah pesisir pantai, hal ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan ekonomi yang berasal dari kegiatan perikanan, pariwisata, dan transportasi. Namun, disisi lain dapat memberikan dampak-dampak negative dari adanya aktivitas tersebut secara berkala akan menyebabkan kerusakan pada fungsi ekosistem dilaut dan di darat. Selain itu abrasi pantai menyebabkan kerusakan pada sekitar bibir pantai. Berdasarkan hal tersebut masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar pantai dapat berperan penting dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk meminimalisir kerusakan pada pesisir pantai (Saputri dan Muchtar, 2019).

Vegetasi hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropic yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin (Warsidi dan Endayani, 2017). Hutan mangrove meliputi pohon-pohon dan semak yang tergolong ke dalam 8 famili, dan terdiri atas 12 genera tumbuhan berbunga : *Avicennia sp.*, *Sonneratia sp.*, *Rhizophora sp.*, *Bruguiera sp.*, *Ceriops*, *Xylocarpus*, *Lummitzera*, *Laguncularia*, *Aegiceras*, *Aegiatilis*, *Snaeda*, dan *Conocarpus* (Bengen, 2002). Susunan formasi dari masing-masing di atas sangat dipengaruhi oleh kadar garam yang semakin ke darat semakin berkurang.

Kerusakan ekosistem mangrove di Indonesia lebih karena disebabkan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang manfaat ekosistem mangrove di kawasan pasang surut tersebut. Pohon mangrove terus ditebang secara tidak terkendali hanya demi kepentingan ekonomi seperti pemanfaatan sebagai bahan industri arang untuk ekspor, kegiatan perikanan sebagai lahan tambak, pemukiman, pelabuhan, perkebunan, pertambangan, kawasan industri, dan sebagainya. Sehingga mengabaikan keseimbangan ekologi, keadaan ini diperlukan langkah-langkah pengelolaannya yang bijaksana untuk kelestarian sumberdaya alam ini (Lasibani dan Kamal, 2010).

Ampiang Parak adalah salah satu nagari yang terletak di jalan Lintas Barat ,Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan titik kordinat LS 1°37'51" BT 100°39'30". Pada kawasan ini diketahui jenis mangrove *Rhizophora sp.* tumbuh

dengan baik secara alami, dengan demikian bahwa kondisi biofisik sangat mendukung untuk dilakukan penanaman mangrove jenis *Rhizophora sp.* Penanaman bibit mangrove di kawasan ampiang parak dengan luasan 2 ha.

Sebagian besar masyarakat Nagari Ampiang Parak bermata pencaharian sebagai nelayan dengan total 1.637 (33%) dibandingkan dengan yang lainnya. Penyebab salah satu adalah kondisi wilayah Nagari Ampiang Parak yang terletak sepanjang garis pantai yang terdapat empat kampung, yaitu Kampung Alai, Kampung Pasar Hamparan Perak, Kampung Padang Tae dan Kampung Ujung Air (Zamzami, 2010).

Ampiang parak merupakan salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Ampiang Parak sebelumnya merupakan pantai yang gersang, tandus yang sering terjadi abrasi pantai. Karena kondisi tersebut, masyarakat setempat dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang berkerjasama untuk mengelola kawasan pantai tetap lestari dan ingin di lindungi dengan cara penanaman tanaman bibit mangrove dengan total 35.000 pada kawasan pantai (Saputri dan Muchtar, 2019). Maka dari data dan kondisi keadaan kawasan mangrove tersebut, diperlukan penelitian ini yang berjudul “Struktur Vegetasi Tumbuhan Mangrove di Ampiang Parak Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat”.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui struktur vegetasi tumbuhan mangrove di Nagari Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan. Fokus penelitian ini meliputi, kerapatan, frekuensi, indeks nilai penting, dominansi, dan basal area mangrove.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan untuk memberikan informasi atau gambaran kondisi mangrove di Nagari Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan.